

Seri Buku AIHII: Isu-Isu Kontemporer Internasional

Konflik Rusia-Ukraina: Tinjauan dari Berbagai Perspektif



Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

Seri Buku AIHII: Isu-Isu Kontemporer Internasional

Konflik Rusia-Ukraina: Tinjauan dari Berbagai Perspektif

Editor:

Dr. Randhi Satria, S.IP., M.A

Dr. Iva Rachmawati, M.Si

Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc.

AIHII Press

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Depok City, Jakarta
12450

Telepon : (021) 7656971

Email : press@aihii.or.id

Cetakan Tahun 2022

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

AIHII Press

118 + viii hlm; 6,5 inc x 9,25 inc

ISBN : 978-623-09-1143-9

Penata Letak : Septyanto Galan Prakoso, S.I.P., M.Sc.

Desain Sampul : Ferdian Ahya Al Putra, S.Sos., M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkah dan rahmat Allah Yang Mahakuasa, buku ini akhirnya bisa diselesaikan dengan lancar dan baik. Sebagai terbitan pertama dari AIHII, buku ini sekaligus menjadi simbol ikhtiar kemajuan dalam bidang publikasi karya-karya ilmiah dosen Hubungan Internasional di Indonesia.

Buku ini penting untuk ditulis mengingat bahwa setelah berpuluh tahun sejak Perang Dunia II berakhir, Rusia kembali menggerakkan militernya sebagai upaya untuk menjadi keamanan negaranya yang dinilai berada dalam kondisi terancam.

Di tengah situasi pandemi yang sedikit banyak membawa solidaritas sebagai kode bersama dalam menjalin hubungan antarnegara, keputusan Rusia seakan mengingatkan bahwa realisme politik masih memiliki pengaruh penting dalam tata kehidupan antarnegara.

Beragamnya naskah yang masuk baik dari sudut pandang maupun metode penulisan, serta berdasarkan pertimbangan dari Dewan Guru Besar, Tim Editor akhirnya memutuskan agar buku ini bisa mewadahi beragam sudut pandang dan metode sehingga mampu mewadahi kekayaan studi Hubungan Internasional.

Tulisan-tulisan yang terhimpun di dalam buku ini tidak hanya disusun dengan gaya penulisan ilmiah, akan tetapi juga terdapat tulisan yang disusun dengan gaya penulisan populer dengan cara uniknya sendiri. Buku ini juga diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi para pengkaji studi Hubungan Internasional baik mahasiswa, dosen maupun praktisi, selain tentunya diharapkan bisa menjadi salah satu kepingan rekam jejak Konflik Rusia-Ukraina.

Jakarta, 22 November 2022

Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional

Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	viii
Bab I. Sejarah Invasi Rusia di Ukraina dalam Kacamata Geopolitik..	1
Sejarah Awal Konflik Rusia-Ukraina.....	2
Kepentingan Ukraina Bergabung dalam NATO.....	6
Sejarah Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022	9
Geopolitik Memandang Invasi Rusia ke Ukraina	10
Implikasi Invasi Rusia bagi Ukraina dan terhadap Dunia Internasional	19
Daftar Pustaka	25
Bab II Invasi Rusia terhadap Ukraina: Perspektif Rusia terhadap	
Sejarah Identitas Rusia-Ukraina dan 'NATOisasi'	31
Sejarah dan Identitas Rusia.....	32
Ikatan Sejarah dan Identitas Rusia-Ukraina dari Kievan Rus hingga Uni Soviet	33
NATOisasi Ukraina dalam Perspektif Rusia	40
Penutup.....	51
Daftar Pustaka	51
Bab III Tinjauan Normatif Intervensi Dewan Keamanan PBB	
terhadap Konflik Rusia-Ukraina 2022	55
Konflik Rusia dan Ukraina pada Era Putin dan Biden	56
Rusia dan NATO di DK PBB pada Isu Geopolitik dan Keamanan Eropa Timur.....	62
Penutup.....	67
Daftar Pustaka	68
Bab IV Diplomasi Multilateral dalam Konflik Rusia-Ukraina	70
Latar Belakang Masalah	70
Perluasan Keanggotaan NATO	71
Klaim Genosida terhadap Etnis Rusia di Ukraina	73
Klaim Bahwa Ukraina Bukan Negara	74
Klaim Kepemilikan Senjata Nuklir	75

Keinginan Rusia Membangun Kembali Kejayaan Uni Soviet	76
Diplomasi Preventif Melalui Forum Multilateral	77
Diplomasi Multilateral Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	79
Diplomasi Multilateral dalam Uni Eropa (EU)	81
Kerja Sama Multilateral Melalui G7	82
Kerja Sama Multilateral Melalui G-20.....	83
Kerja Sama Kawasan Melalui Association of South East Asian Nation (ASEAN)	84
Penutup	84
Daftar Pustaka	85
Bab V <i>Onsite War & Online War</i> dalam Konflik Rusia-Ukraina sebagai Perang Dunia Ketiga.....	90
Metodologi	90
Perang Dunia Ketiga adalah Gabungan Perang Militer, Perang Ekonomi dan Perang Wacana	93
Perang Wacana	97
Dukungan <i>Netizen</i> Indonesia terhadap Rusia di Media Sosial.....	98
Standar Ganda Barat Alasan Lain <i>Netizen</i> Indonesia Dukung Rusia	100
Penutup.....	109
Daftar Pustaka	110
Bab VI Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Komoditas	
Ekspor Indonesia dan Pendekatan Diplomasi Ekonomi Minyak Nabati sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia	112
Diplomasi Ekonomi	115
Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Komoditas Ekspor Minyak Nabati Indonesia	120
Diplomasi Ekonomi Minyak Nabati Indonesia sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri.....	123
Penutup	130
Daftar Pustaka	131
Bab VII Merumuskan Kepentingan Politik Indonesia dalam	
Konflik Rusia-Ukraina.....	134
Special Military Operation.....	135
Jalannya Konflik dan Dampak Konflik.....	138

Aktivitas Politik Bebas-Aktif Pemerintahan Joko Widodo dalam Konflik Rusia-Ukraina.....	145
Pendekatan Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: <i>'Middle Power Diplomacy'</i>	152
Penutup.....	156
Daftar Pustaka	157
Bab VIII " <i>Indispensable Nation</i> " dan Peran Amerika Serikat dalam Krisis di Ukraina.....	163
Dari Momen <i>Unipolar</i> hingga Kemunduran Amerika	165
Memahami " <i>Indispensability</i> " Amerika Serikat	170
Krisis di Ukraina: Apakah Amerika Serikat Masih <i>Indispensable?</i>	176
DAFTAR PUSTAKA	181
BIODATA PENULIS.....	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Peta dan Sejarah Negara Anggota NATO	7
Gambar I.2. Peta Invasi Rusia di Ukraina	9
Gambar I.3. Peta Kondisi Geografis Ukraina.....	11
Gambar I.4. Peta Wilayah Ukraina yang Dikuasai Rusia.....	14
Gambar I.5. Peta Cakupan Loren-C Rusia di Ukraina.....	15
Gambar V.1. Diplomasi Multi Jalur	91
Gambar V.2. Respons Publik Indonesia	95
Gambar V.3. Daftar Lengkap Perusahaan Makanan-Minuman yang Setop Bisnis di Rusia.....	96
Gambar V.4. Olga Boichak Lukisan Tembok di Sudut Jalan Australia	103
Gambar V.5. @MessengerSash.....	103
Gambar V.6. Anekdota Kritis terhadap Rusia.....	104
Gambar V.7. Gambaran Jika Ukraina Bergabung NATO atau Rusia.....	105
Gambar V.8. Berbagi Api antara Presiden Soekarno dengan Presiden Khrushchev di Moscow, Rusia Tahun 1960	107
Gambar VI.1. Kerangka Konseptual Diplomasi Ekonomi.....	115
Gambar VI.2. Kontribusi minyak nabati terhadap pencapaian SDGs	125
Gambar VII.1. Kerusakan dari Serangan Rusia di Wilayah Sipil..	136
Gambar VII.2. Posisi Wilayah Kelompok Separatis di Antara Kedua Negara.....	137
Gambar VII.3. Serangan Udara Rusia di Rumah Sakit Bersalin Mariopol	139
Grafik VII.1. Grafik Data Pengungsi dari Ukraina.....	140
Gambar VII.4. Aksi Protes di Manezhnaya Square, Central Moscow	142
Gambar VII.5. Joko Widodo Bertemu Pemimpin Negara-Negara Barat pada Forum G7	150
Gambar VII.6. Perbandingan Posisi Putin <i>Press Conference</i> dengan Joko Widodo dan Olaf Scholz (Kanselir Jerman)	151
Gambar VII.7. Potret Ibu Negara Indonesia dalam Kunjungan ke Ukraina.....	153

Bab VI

Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Komoditas Ekspor Indonesia dan Pendekatan Diplomasi Ekonomi Minyak Nabati sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Leonard Felix Hutabarat

Disrupsi rantai pasokan global (*global supply chain*) yang sudah dimulai semenjak perang dagang AS-Tiongkok, kini dapat dipastikan akan terus berlanjut. Pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina telah memperluas krisis rantai pasokan global dewasa ini. Kebijakan *lockdown* yang ditempuh sejumlah negara, terutama RRT, telah menyebabkan keterlambatan produksi, gangguan logistik akibat pelabuhan yang tidak dapat beroperasi maksimal serta pengurangan tenaga kerja. Terdapat setidaknya 5 (lima) kategori ekspor yang terpengaruh oleh disrupsi rantai pasokan global: produk-produk pertanian, bahan kimia, manufaktur, logam, serta minyak dan gas (McKinsey, 2022). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti: penurunan produksi dan banyaknya penutupan pabrik manufaktur, rendahnya pembelian barang-barang yang bersumber dari Rusia, akibat sanksi ekonomi atau sanksi yang dikenakan sendiri oleh perusahaan; dan disrupsi logistik yang terjadi pada angkutan udara, laut serta jalur darat dan kereta api.

Rantai pasokan global yang terus mengalami tekanan membawa dampak terhadap Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk gandum dan bahan-bahan pupuk. Indonesia merupakan salah satu importir gandum terbesar di dunia. Menurut data BPS, pada periode 2021, impor gandum Indonesia mencapai 11,48 juta metrik ton dengan nilai USD 3,3 miliar. Impor terbesar berasal dari Australia (40,90 persen), Ukraina (26,8 persen), dan Kanada (16,7 persen). Gandum memiliki nilai strategis untuk pasokan tepung guna menopang industri makanan di Indonesia. Berdasarkan data APTINDO, terigu diperlukan

utamanya untuk usaha UMKM dan Rumah Tangga (71 persen: roti, eceran, mie basah, kue tradisional, biskuit, kue, panekuk, pastri) dan selebihnya untuk industri besar (29 persen, termasuk mie instan). Terkait komoditas pakan ternak, pada kuartal keempat tahun 2021, Pemerintah RI melakukan impor 300 ribu metrik ton gandum sebagai alternatif bahan baku pakan ternak di tengah kenaikan harga jagung. Terkait pupuk, Indonesia merupakan importir pupuk terbesar ke-10 di dunia dengan total pangsa impor terhadap total impor dunia sebesar 2,31%. Sumber impor pupuk Indonesia tersebut utamanya berasal dari Kanada, RRT, Rusia, Belarus, dan Viet Nam. Indonesia juga tercatat sebagai importir terbesar salah satu bahan pupuk, yaitu *phosphate*. Lima negara pengekspor *phosphate* terbesar untuk Indonesia adalah RRT, Thailand, Jerman, Perancis, dan AS.

Dalam menyikapi situasi rantai pasok global dewasa ini, langkah-langkah yang telah Indonesia lakukan penting untuk dilanjutkan, termasuk: mencari sumber pasokan alternatif, menjaga perekonomian Indonesia terbuka serta tidak mengambil langkah proteksionisme, dan mengkapitalisasi situasi yang terjadi untuk transisi energi dan skema ketahanan pangan yang lebih *viable*. Selain itu, melihat tantangan dari disrupsi rantai pasokan dunia, untuk dapat mencapai ketahanan rantai pasokan Indonesia juga dapat memaksimalkan peluang yang ada. Kekosongan produksi akibat perang Rusia-Ukraina dapat menjadi peluang untuk produksi komoditas Indonesia masuk di rantai pasokan global. Komoditas utama seperti *crude palm oil* (CPO) atau minyak nabati Indonesia, batubara dan nikel dapat menjadi komoditas yang mampu bersaing di rantai pasokan global. Kekurangan produksi nikel, kebijakan Uni Eropa dan Jepang untuk berhenti mengimpor batu bara dari Rusia, dan kebutuhan CPO sebagai substitusi biji bunga matahari yang berkurang dari Ukraina akan menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk masuk pasar global.

Kondisi dan perkembangan ekonomi politik internasional di atas memerlukan perspektif akademik yang saling melengkapi guna memperkaya studi kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi, tentu saja bukanlah suatu fenomena baru. Sejak awal interaksi *nation-state* di masa lalu, kepentingan-kepentingan ekonomi telah menjadi pendorong berkembangnya hubungan antarnegara. Seringkali dimensi ekonomi tidak memperoleh perhatian dari mahasiswa yang mempelajari diplomasi secara tradisional. Saat ini banyak pemerintah memberikan

prioritas lebih besar terhadap diplomasi komersial dan memandang diplomasi seharusnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan nasional (*national welfare*) dan keamanan ekonomi (*economic security*). Sejumlah krisis yang terjadi dunia dan permasalahan global yang berkaitan dengan pangan, energi, lingkungan, dan finansial serta ekonomi global, memaksa negara untuk mempengaruhi *regime* internasional dan institusi pada tatanan global (*global governance*). Kondisi ini memerlukan pemahaman mengenai diplomasi ekonomi dalam studi hubungan internasional guna melihat keterkaitan sebagaimana pemikiran "*liberal peace*" menjelaskan hubungan meningkatnya perdagangan bilateral dan investasi dengan menurunnya eskalasi konflik di antara negara (Hakim, 2021). Dampak ini sama pentingnya bagi dalam ilmu politik, di mana implikasi "*low politics*" dari diplomasi ekonomi dan komersial tidak terpisahkan dari hubungan politik global (Masoeed, 1994; Hadiwinata, 2017).

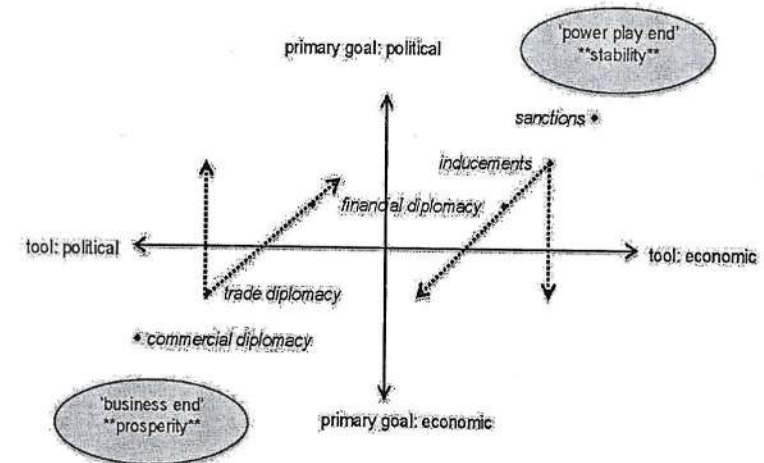
Diplomasi ekonomi tentunya tidak hanya mengenai kepentingan komersial dan ekonomi dalam arti sempit. Diplomasi ekonomi melibatkan kepentingan nasional lebih luas, termasuk dimensi politis dan strategis, selain ekonomi (Viotti & Kauppi, 1993; Wæver & Newmann, 1997; Griffiths, 1999). Pemerintah membuat desain dan melakukan diplomasi ekonomi dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi nasional dan keamanan ekonomi (Sabaruddin, 2017). Diplomasi ekonomi pada saat yang sama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri (Moons & van Bergeijk, 2017). Tulisan ini menjelaskan kerangka dan konsep diplomasi ekonomi guna memahami kegiatan diplomasi ekonomi, dan tujuannya dalam konteks diplomasi minyak nabati Indonesia. Negara tidak dilihat sebagai satu-satunya aktor, namun menjadi *primary actor* dalam diplomasi ekonomi. Kerangka konseptual dari diplomasi ekonomi akan dilihat dari tujuan "*business*" atau "*power*" dalam diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri, dan semakin banyak menunjukkan keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan kebijakan luar negeri suatu negara (Hutabarat, 2005; Lestari et. al, 2020; Killian, 2022). Berdasarkan kondisi dan perkembangan ekonomi politik internasional di atas, khususnya konflik Rusia-Ukraina, dampak yang terjadi terhadap komoditas ekspor Indonesia, khususnya minyak nabati, menjadikan Indonesia menggunakan diplomasi minyak nabati sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Tulisan ini akan membahas bagaimana Indonesia harus

menggunakan narasi pembangunan berkelanjutan dalam konteks minyak nabati Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs 2030, termasuk instrumen diplomasi ekonomi dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi minyak nabati Indonesia.

Diplomasi Ekonomi

Dalam menjelaskan diplomasi minyak nabati Indonesia dalam konteks dampak yang terjadi terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia akibat konflik Rusia-Ukraina, diperlukan pemahaman terhadap konsep yang ada di dalam diplomasi ekonomi. Pemahaman terhadap konsep diplomasi ekonomi akan menjelaskan mengapa Indonesia menggunakan narasi tertentu dalam diplomasi minyak nabati dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di bidang ekonomi pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Melalui pertimbangan bahwa *nation-state* bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, namun *nation-state* adalah aktor utama dalam diplomasi ekonomi, dalam kerangka pemikiran *state-centric realist*, diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai upaya mencapai keamanan ekonomi dalam politik internasional yang anarkis (Lee and Hocking, 2010).

Gambar VI.1. Kerangka Konseptual Diplomasi Ekonomi



Sumber: Okano-Heijmans, 2011.

Apabila keamanan ekonomi (*economic security*) terdiri atas kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik dari suatu negara, maka diplomasi ekonomi yang dilakukan suatu pemerintahan melibatkan sejumlah instrumen, baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, diplomasi ekonomi meliputi: “*business-end*” dan “*power-end*”, dan semua upaya dari diplomasi ekonomi dapat berada di antara dua aspek ini (Lihat Gambar 4.1 Dari bagan tersebut terlihat tujuan yang dicapai suatu negara terletak pada pertimbangan kepentingan nasional, pada satu sisi *economic prosperity* serta *political stability* dan *national security* pada sisi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi memiliki bentuk “*power*” yang berbeda-beda. Menurut Berger (2010) kekuatan ekonomi adalah salah satu sumber *soft power* yang paling mendasar dan paling penting, namun juga mendukung kekuatan militer.

Sementara Berridge dan James (2003) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai kebijakan ekonomi dan diplomasi yang menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai *rewards* atau *sanctions*, dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Selain itu, Gilpin (1987, 2020) menyatakan esensi dari diplomasi ekonomi adalah melakukan dan mengarahkan kegiatan politik dan ekonomi. Berdasarkan konseptualisasi dan definisi di atas, Okano-Heijmans (2013) mendeskripsikan bentuk-bentuk dari diplomasi ekonomi menjadi *commercial diplomacy*, *trade diplomacy*, *financial diplomacy*, *inducements* dan *sanctions*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk diplomasi ekonomi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel VI. 1. Bentuk Diplomasi Ekonomi

Commercial Diplomacy	Trade Diplomacy	Financial Diplomacy	Inducements	Sanctions
Trade Promotion	Bilateral FTAs	Currency Swap Agreements	Bilateral Assistance: grants, loans	Embargo (exports; state)
Investment Promotion	Multilateral: WTO	Exchange Rate Policy	Debt Relief	Boycott (imports; individuals)
Business Advocacy	Anti-dumping, Tariffs	Buying/selling of Government Bonds	Humanitarian Aid	Suspending of Assistance and Aid

Commercial Diplomacy	Trade Diplomacy	Financial Diplomacy	Inducements	Sanctions
Tourism promotion	Export/ import License	Freezing Assets	Granting Access to Technology	Capital Controls
Promotion of Socially Responsible Investing	Import/ Export Quotas, Trade and Investment Barriers	Withholding Dues or \ Payments	Granting Membership of International Organization	Blacklist

Sumber: Okano-Heijmans, 2013.

Berbagai kebijakan luar negeri suatu negara saat ini menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau kawasan lain. Diplomasi ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri suatu negara dalam menjalankan hubungan internasionalnya dengan negara lain atau organisasi regional maupun multilateral (Dinnata & Nuraeni, 2020). Banyak negara juga melakukan interaksi dengan organisasi regional di kawasan lain dalam konteks diplomasi ekonomi (Hutabarat, 2018; Haryono, 2019). Dalam konteks mengembangkan pasar non-tradisional, Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Alliance* di kawasan Amerika Selatan, termasuk upaya menjalin kerja sama ekonomi dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Chile. Prioritas kebijakan luar negeri Indonesia pada periode 2020-2024 juga menempatkan diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas (Kementerian Luar Negeri, 2020).

Diplomasi ekonomi yang dipelajari melalui hubungan internasional terutama berkaitan dengan isu-isu *high politics* dan isu-isu yang berkenaan dengan keamanan nasional, di mana kepentingan nasional utamanya diartikan dalam konteks stabilitas nasional. Baldwin (1985) mengenalkan studi *economic statecraft*, yang merujuk pada pemahaman ekonomi sebagai suatu tujuan politik. Elemen *power-play* atau *high politics* menjelaskan mengapa ilmuwan politik yang membahas hubungan antara politik internasional dan ekonomi seringkali menggunakan “*economic*

statecraft" atau cenderung membahasnya tanpa menghubungkan pada suatu konsep. Dalam konteks ini perhatian sering ditujukan pada sanksi, baik yang bersifat negatif atau positif, dan pembahasan terkait *economic statecraft* lebih pada hubungan antara kebijakan luar negeri pada satu sisi dan perdagangan atau investasi pada sisi lain.

Fokus perhatian terhadap diplomasi ekonomi dapat dilihat pada tiga area. Pertama, konsep yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara ekonomi internasional dan kebijakan luar negeri. Kedua, studi yang membahas praktik diplomasi ekonomi, seperti bantuan pembangunan, kebijakan perdagangan normatif investasi pada negara tertentu. Ketiga, aspek atau hukum internasional, termasuk institusi legal yang menangani perdagangan internasional.

Ekonomi politik internasional utamanya menaruh perhatian terhadap kekuatan politik yang membentuk melalui interaksi ekonomi, termasuk dampak interaksi ekonomi terhadap struktur politik. Pengamat ekonomi politik internasional memandang diplomasi ekonomi melibatkan campuran dari tujuan kebijakan luar negeri dan upaya komersial, dan tujuan komersial dan upaya politik dalam lingkungan tertentu di mana diplomasi ekonomi dijalankan oleh suatu negara (Rana, 2012). Fokus studi ini adalah diplomasi perdagangan (*trade diplomacy*) dan diplomasi komersial (*commercial diplomacy*). Diplomasi perdagangan membahas liberalisasi perdagangan dan kekuatan perdagangan. Contoh ini adalah diplomasi perdagangan dan ekonomi (Woolcock, 2012a; 2012b). Sementara diplomasi komersial membahas program pemerintah yang melibatkan *trade finance*, *trade facilitation*, dan *trade missions*. Pembahasan negosiasi perdagangan, investasi dan keuangan menjadi bagian dari kategori ini.

Sejak tahun 1980-an diplomasi dan negosiasi internasional menjadi perhatian para akademisi hubungan internasional. Pendorong utama hal ini adalah karakter diplomasi sebagai suatu institusi yang memberikan kontribusi terhadap tatanan dalam masyarakat internasional, selain kontribusi terhadap tatanan dalam masyarakat internasional, selain *balance of power*, *international law*, dan *war and the great powers* (Bull, 2002). Sejalan dengan perkembangan ini adalah bahwa sejak tahun 1970-an dalam studi hubungan internasional terdapat banyak perkembangan organisasi internasional. Demikian juga pemahaman *constructivism* maupun teori *neo-realist* dan *neo-liberalist* dalam kepentingan dan proses dalam hubungan internasional. Analisis dalam kategori diplomasi ekonomi pada umumnya dijelaskan oleh Lee and Hocking (2010) serta Bayne and

Woolcock (2007) dan penekanan pada bentuk *commercial diplomacy* oleh Lee and Hudson (2004). Kategori lainnya menyempitkan pembahasan pada aspek negosiasi, seperti pembahasan terkait *General Agreement on Tariffs and Trade*-GATT (Lee and Hudson, 2004). Bayne and Woolcock (2007) menyatakan diplomasi ekonomi menjadi bagian dari ekonomi politik internasional. Akademisi ekonomi politik internasional melihat kepentingan institusi dalam perdagangan dunia, sementara akademisi diplomasi ekonomi akan membahas mengapa dan bagaimana pemerintah melakukan negosiasi kesepakatan terhadap penurunan tarif.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia terlihat mengalami perkembangan yang menarik tidak hanya dalam konteks *financial diplomacy*, maupun *trade diplomacy*, namun juga termasuk *commercial diplomacy* dalam beberapa tahun terakhir ini (Nugroho, 2021). Berbagai inisiatif dan negosiasi dilakukan dalam berbagai perundingan perdagangan baik secara bilateral, regional dan multilateral. Beberapa negosiasi perdagangan yang telah dilakukan dapat terlihat sebagaimana disampaikan melalui website Kementerian Perdagangan (www.kemendag.go.id).

Tabel. VI.2. Perundingan Perdagangan yang Telah Dilakukan Indonesia

INDONESIA TRADE NEGOTIATIONS AGENDA AS OF NOVEMBER 2021		
CONCLUDED/IMPLEMENTED		ON-GOING
1. Indonesia-Japan FTA Signed: 2007, Implementation: 2008 (General Economic FTA) Completed: 1 June 2008 Current Status: Negotiations for Protocol on Services (GPA) concluded 2011 Target of Conclusion: 2022	13. ASEAN-China FTA (ACFTA) Signed: 12 November 2002, Implementation: 1 August 2003 (Goods only) Protocol: 2007	5. Indonesia-Eurasian Customs Union Signed: 2017, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
2. Indonesia-Pakistan FTA Signed: 2012, Implementation: 2013 (Protocol by Annex: EFTA) Signed: 27 June 2013, Implementation: 1 August 2013	14. ASEAN-Hong Kong, China FTA Signed: 17 November 2011, Implementation: 1 July 2013	6. Indonesia-Taiwan EPA Signed: 2016, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
3. Indonesia-Pakistan Trade Facilitation for Certain Products Signed: 2012, Implementation: 2013 Signed: 27 June 2013, Implementation: 1 August 2013	15. ASEAN-Pakistan Agreement on Services (APAS) Signed: 17 November 2011, Implementation: 1 July 2013	7. Indonesia-Turkey FTA Signed: 2016, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
4. Indonesia-Chile FTA (Trade in Goods) Signed: 14 December 2011, Implementation: 10 August 2013 Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019)	16. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Signed: 21 February 2009, Implementation: 12 June 2010 First Protocol for Animal Origin: 14 June 2010 Continuation (LAMP) Scheme Signed: 21 January 2010, Implementation: 10 September 2010	8. Indonesia-Turkey FTA Signed: 2016, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
5. Indonesia-Australia EPA Signed: 4 March 2010, Implementation: 9 July 2010	17. ASEAN Trade in Services Agreement (ATS) Signed: 8 November 2006, Implementation: 1 January 2007	9. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
6. Indonesia-EFTA EPA Signed: 14 December 2011, Signed: 27 June 2013 Implementation: 1 September 2013	18. ASEAN Comprehensive Economic Partnership Signed: 15 November 2002, Implementation: 1 January 2010	10. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
7. Indonesia-Mexico FTA Signed: 17 August 2011, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022	19. ASEAN Comprehensive Economic Partnership (ASEAN) Signed: 15 November 2002, Implementation: 1 January 2010	11. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
8. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) Signed: 15 August 2010, Implementation: 1 January 2010 (Protocol 2019)	20. ASEAN Trade in Services Agreement (ATS) Signed: 8 November 2006, Implementation: 1 January 2007	12. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
9. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) Signed: 12 October 2005, Implementation: 1 January 2010	21. Trade Facilitation Agreement (TFA) Signed: 7 November 2014, Implementation: 1 January 2015	13. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
10. ASEAN Agreement on Intellectual Property Protection Signed: 15 November 2002, Implementation: 1 January 2010	22. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Signed: 15 November 2020, Implementation: 1 January 2022	14. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022
11. ASEAN-India FTA (AIFTA) Signed: 12 October 2005, Implementation: 1 January 2010	23. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Signed: 10 December 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022	15. Indonesia-Korea FTA Signed: 2010, Current Status: 100% Ratified (Protocol 2019) Target of Conclusion: 2022

Sumber: www.kemendag.go.id

Berbagai negosiasi perdagangan juga sedang dilakukan Indonesia dengan berbagai mitra saat ini, termasuk beberapa penajakan perundingan perdagangan dengan banyak negara maupun dalam konteks Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN). Beberapa negosiasi perdagangan yang sedang diusulkan atau diujjagi dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel VI.3. Perundingan Perdagangan yang Sedang Dilakukan Indonesia

TRADE NEGOTIATIONS BEING PROPOSED/EXPLORED	
1. Indonesia-South African Customs Union (SACU) Current Status: Being proposed (2017), waiting for response	11. Indonesia-MERCOSUR Current Status: Discussing Scoping Paper for negotiation coverage
2. Indonesia-Economic Community of West African States (ECOWAS) PTA Current Status: Being proposed (2017), waiting for response	12. Indonesia-US United Trade Deal (LTD) Current Status: Being proposed (2020), Indonesia is conducting internal study
3. Indonesia-East African Community (EAC) PTA Current Status: Being proposed (2017), waiting for response	13. Indonesia-TIFF PTA Current Status: Initiated by MoFA Indonesia, it has concluded internal study (2019) while waiting for TIFF's response
4. Indonesia-Djibouti PTA Current Status: Launch of JFS (Aug 2019), on progress for the establishment of JFS	14. Indonesia-Papua New Guinea PTA Current Status: Initiated by MoFA Indonesia (2019)
5. Indonesia-Algeria PTA Current Status: Being proposed (2020), waiting for response	15. Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) Current Status: Being proposed (2017), joint study is currently on going
6. Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) Current Status: Being proposed (2017), waiting for GCC internal study	16. Indonesia-Ukraine PTA Status: Initiated by MoFA RI (2019). Agreed to establish joint study (Dec 2019)
7. Indonesia-Sri Lanka FTA Current Status: Launch of JFS (Jan 2018), Sri Lanka currently on moratorium for new FTAs	17. Indonesia-India PTA Status: Preliminary discussion (2020)
8. Indonesia-Colombia PTA Current Status: Being proposed (2019), pending JFS discussion (Colombia on moratorium for all trade negotiations)	18. ASEAN-Canada FTA Current Status: Reference Paper Discussion (2020) initiated
9. Indonesia-Peru FTA Current Status: Finished JFS (2017), pending on the issue of scope of negotiations	19. ASEAN-European Union FTA Current Status: Setting up Framework Parameters for Negotiation
10. Indonesia-Ecuador Current Status: Being proposed (2018), on progress for the establishment of JFS	20. Indonesia-Afghanistan PTA Current Status: Preliminary discussion (2021)

Sumber: www.kemendag.go.id

Perkembangan yang terjadi di panggung politik Internasional, khususnya akibat konflik Rusia-Ukraina, juga menuntut Indonesia harus menyesuaikan instrumen yang digunakan dalam kebijakan luar negeri, termasuk diplomasi ekonomi.

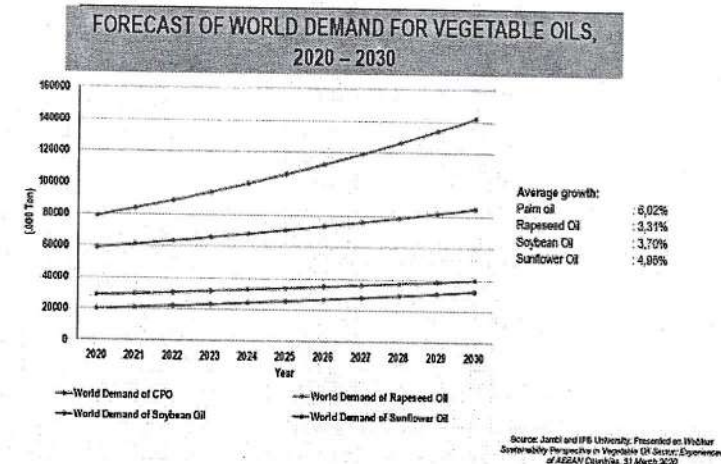
Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Komoditas Ekspor Minyak Nabati Indonesia

Konflik antara Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2022, telah menimbulkan dampak yang signifikan kepada banyak negara, tidak hanya terkait pasokan bahan pangan, pupuk dan energi, namun juga berakibat pada berbagai komoditas perdagangan lainnya di seluruh dunia. Minyak nabati dunia misalnya, sebagai suatu komoditas perdagangan global yang mempunyai peran penting juga mengalami disrupsi pasokan dan berdampak pada totalitas harga yang cenderung naik.

Sebelum konflik Rusia Ukraina, naiknya harga komoditas minyak nabati dipengaruhi oleh berbagai hal seperti: cuaca, kekeringan, isu tenaga kerja, regulasi untuk *biofuel*, serta dampak restriksi Covid-19. Adanya

konflik Rusia Ukraina memperparah harga komoditas minyak nabati hingga meningkat secara signifikan. Selain itu, penggunaan alternatif minyak nabati lainnya juga ada biaya tersendiri dengan adanya persyaratan uji klinis dan persyaratan lainnya yang meningkatkan biaya produksi.

Grafik VI.1. Proyeksi Kebutuhan Minyak Nabati Dunia



Sumber: Universitas Jambi & IPB pada Webinar Sustainability Perspective in Vegetable Oil Sector: Experiences of ASEAN Countries, 2020

Minyak nabati merupakan salah satu komoditas dengan jumlah permintaan global yang tinggi. Jumlah permintaan ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan minyak dunia di lingkup global.

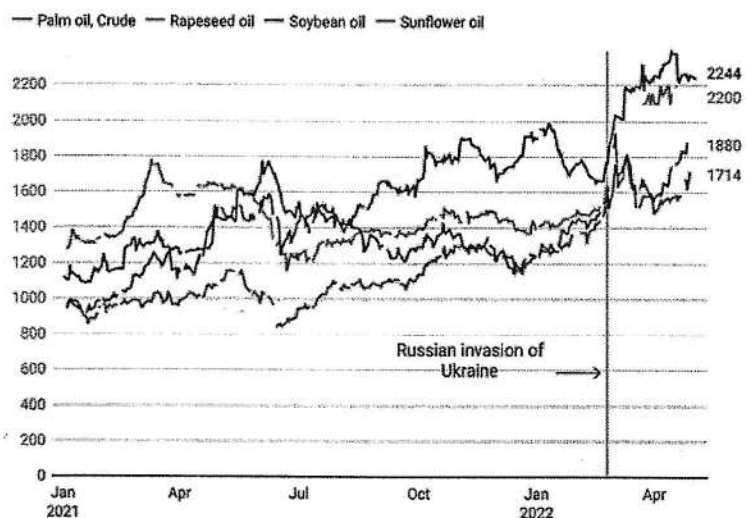
Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan dunia tersebut, minyak nabati justru mengalami berbagai macam tantangan, seperti kebijakan diskriminatif dan kampanye negatif. Beberapa kebijakan yang mendiskriminasi minyak nabati dilakukan berdasarkan berbagai isu, seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya.

Diskriminasi terhadap standar kontaminasi oleh Uni Eropa (UE) terhadap kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Selain itu, terdapat larangan penggunaan Vanaspati Ghee yang bahan dasarnya terbuat dari minyak sawit oleh Pemerintah Punjab di Pakistan karena minyak sawit dianggap tidak sehat. Tuduhan kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi, rusaknya habitat orang utan, dan kerusakan ekosistem hutan/

keanekaragaman hayati, mendorong beberapa negara menerapkan peraturan yang diskriminatif terhadap minyak sawit, seperti kebijakan *Due Diligence* oleh Uni Eropa dan Inggris, serta kebijakan *Forest Act* oleh Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat tuduhan terkait pelanggaran hak buruh, eksploitasi pekerja anak, maupun konflik perebutan lahan dengan masyarakat adat. Berbagai kampanye negatif (*black campaign*), misalnya pemberian label "*Palm Oil Free*" di berbagai produk makanan di Eropa, dan kampanye negatif lainnya melalui berita, *blog*, hingga media sosial.

Grafik. VI. 2. Tren Kenaikan Harga Minyak Nabati yang Hampir Mencapai 30%

Daily vegetable oil prices, current USD



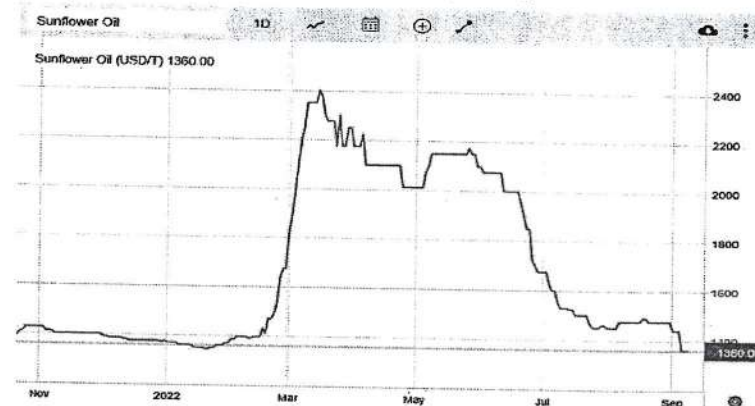
Soybean oil: CBOT, Palm Oil, crude: Malaysian Board daily price, Rapeseed Oil: Rotterdam spot prices, Sunflower oil: India CIF Mumbai price

Chart: David Laborde • Source: MPOB, Bloomberg, CBOT

Sumber: International Food Policy Research Institute, 2022

Krisis yang terjadi antara Rusia-Ukraina juga telah berdampak terhadap kenaikan harga minyak nabati hingga rata-rata mencapai 30%. Minyak bunga matahari (*sunflower*) adalah minyak nabati yang paling terkena dampak langsung dari krisis dengan peningkatan harga yang sempat mencapai USD 2.400/ton pada bulan Maret 2022.

Grafik. VI.3. Kenaikan Harga Minyak Bunga Matahari



Sumber: Trading Economics, 2022

Ukraina dan Rusia merupakan pengekspor terbesar minyak bunga matahari dunia. Ukraina berkontribusi sebesar 48,5% dan Rusia sebesar 21,1% dari total ekspor dunia. Maka dari itu, krisis telah mendorong harga minyak nabati secara signifikan lebih tinggi, dan juga memicu respons kebijakan perdagangan di seluruh dunia yang semakin membatasi pasokan dan menaikkan harga.

Diplomasi Ekonomi Minyak Nabati Indonesia sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri

Pendekatan yang diperlukan dalam diplomasi ekonomi minyak kelapa sawit Indonesia antara lain, pendekatan yang aktif dan inklusif dalam menyuarakan prinsip non diskriminatif dan berkelanjutan. Diplomasi ekonomi dalam hal ini mengedepankan pendekatan yang inklusif, dan non-diskriminasi terhadap semua minyak nabati yang mengacu pada kesepakatan multilateral utamanya:

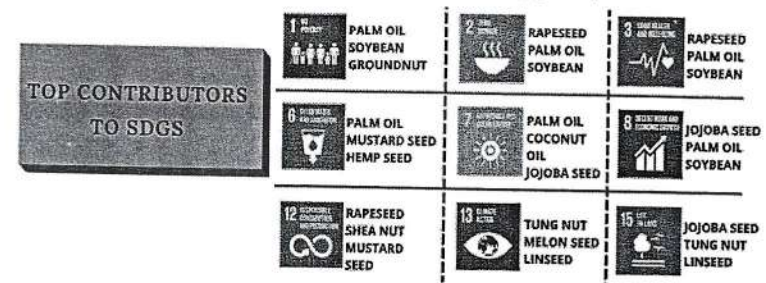
- a. *2030 Agenda for Sustainable Development*, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan internasional terkait target pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dipenuhi sebelum tahun 2030.
- a. *Persetujuan Paris (Paris Agreement)*, yang mewajibkan negara pihak untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca secara global. Isu perubahan iklim sudah juga tercakup dalam SDG 13.

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Terkait hal tersebut, terdapat hasil penelitian berdasarkan fakta dan bukti empiris mengenai kontribusi dua puluh jenis minyak nabati dunia (berdasarkan daftar Food and Agricultural Organization/FAO) terhadap pencapaian SDGs dengan pendekatan analisis komparatif. Terdapat dua puluh jenis minyak nabati yang diteliti adalah:

- 1) *Castor oil seed*
- 2) *Coconut oil*
- 3) *Cotton seed*
- 4) *Groundnut*
- 5) *Hemp seed*
- 6) *Jojoba seed*
- 7) *Kapok fruit*
- 8) *Linseed*
- 9) *Melon seed*
- 10) *Mustard seed*
- 11) *Oil palm*
- 12) *Olive*
- 13) *Poppy seed*
- 14) *Rapeseed*
- 15) *Safflower seed*
- 16) *Sesame seed*
- 17) *Shea nut*
- 18) *Soybean*
- 19) *Sunflower seed*
- 20) *Tung nut.* (Kementerian Luar Negeri, 2021).

Dari hasil kajian tersebut, diperoleh informasi mengenai aspek tertinggi terhadap pencapaian masing-masing SDGs.

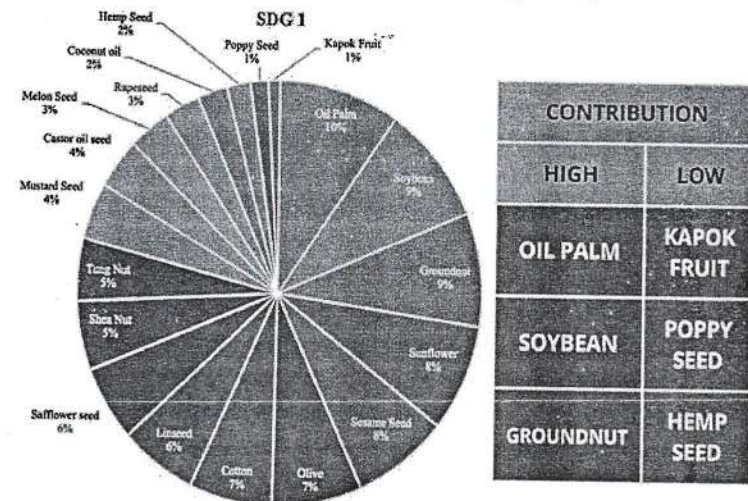
Gambar VI.2. Kontribusi minyak nabati terhadap pencapaian SDGs



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022.

SDG 1 (*No Poverty*): minyak sawit merupakan kontributor tertinggi, dengan meningkatkan ketahanan pangan sebesar 80%, mendorong peningkatan pendapatan rata-rata suatu negara dan mengurangi kemiskinan sebesar 20-30%. Data menunjukkan bahwa minyak sawit berkontribusi sebesar 3,5% dari pertumbuhan PDB Indonesia serta menciptakan 7,5 juta pekerjaan di Indonesia.

Diagram VI.1. Kontribusi Minyak Nabati terhadap Pencapaian SDGs 1

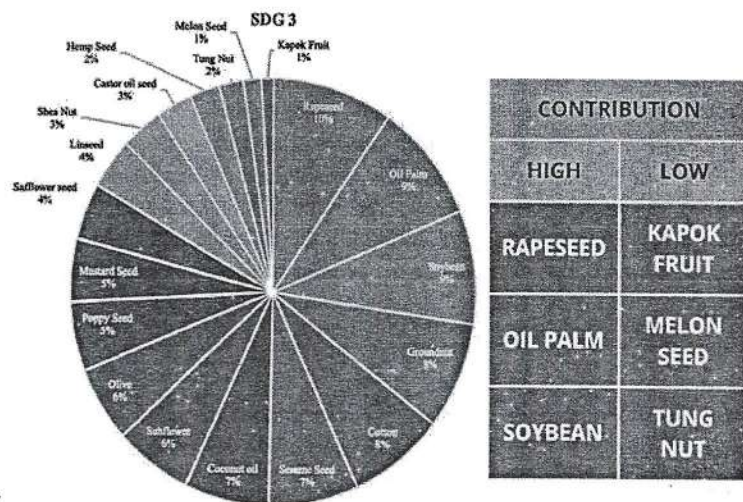


Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022.

SDG 3 (*Good Health and Well Being*): Minyak *rapeseed* adalah minyak nabati yang dapat menjadi kandidat ideal dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang baik secara global. Minyak *rapeseed* berperan dalam mengurangi polusi udara karena hanya menghasilkan 3,77 kg emisi gas rumah kaca secara global. Minyak *rapeseed* juga dapat menyediakan 13 kalori per orang per hari untuk mendukung hidup sehat warga.

Diagram VI.2. Kontribusi Minyak Nabati terhadap Pencapaian SDGs 3

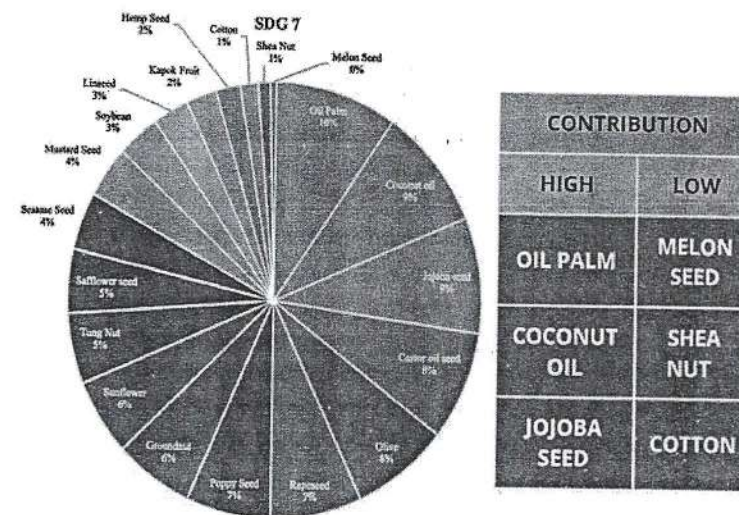
SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022.

SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*): Minyak nabati yang paling menjanjikan dalam penyediaan sumber energi terbarukan adalah minyak sawit dengan rasio produktivitas biodiesel sebesar 4.736,00 liter per hektare secara global dan tingkat emisi gas rumah kaca dari minyak sawit sebesar 7,32 kg emisi gas rumah kaca secara global. Kondisi ini membuat minyak sawit sebagai penyedia bahan bakar pengganti solar konvensional karena memiliki rasio produktivitas biodiesel yang tinggi dan emisi gas rumah kaca yang rendah, sehingga dapat memasok bahan bakar terbarukan dan energi bersih yang terjangkau.

Diagram VI.3. Kontribusi Minyak Nabati terhadap Pencapaian SDGs 7
SDG 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022.

Berdasarkan data-data yang tersaji di atas, diketahui bahwa secara umum, komoditas minyak nabati memainkan peran penting dalam kontribusi dan pencapaian SDGs, antara lain, melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatkan PDB, menyediakan pasokan protein dan lemak tak jenuh ganda yang baik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memasok sumber energi terbarukan (biodiesel).

Upaya untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor minyak nabati di antaranya dilakukan dengan pengarusutamaan diplomasi minyak nabati sebagai upaya mendorong perlakuan yang holistik, adil, non-diskriminatif, dan berimbang antara aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam kerangka SDGs 2030 untuk seluruh jenis minyak nabati, tanpa pembedaan terhadap minyak nabati tertentu, seperti minyak sawit. Upaya diplomasi ekonomi minyak nabati telah dilakukan di berbagai level, seperti bilateral, regional dan multilateral.

Bentuk upaya diplomasi ekonomi minyak nabati di level bilateral telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain sosialisasi, seminar, kerja sama dengan kalangan universitas di dalam dan luar negeri

serta *policy dialogue and discussion*. Sosialisasi/webinar terkait *Sustainable Vegetable Oil* (SVO) minyak nabati berkelanjutan bekerja sama dengan beberapa Perwakilan RI, seperti KBRI Stockholm pada tahun 2021, KBRI New Delhi di tahun 2021, dan KBRI Islamabad pada awal tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang akademisi dan *think tank* dari negara setempat untuk *sharing of knowledge* terkait penerapan praktik-praktik berkelanjutan untuk komoditas minyak nabati yang diproduksi di masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini merupakan kesempatan penting untuk menjalin jejaring antarpeneliti dan akademisi yang diharapkan dapat berkolaborasi untuk riset-riset terkait SVO.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melakukan diseminasi melalui seminar internasional seperti *the 8th Cross-Sector Social Interactions (CSSI) Online Symposium* pada Panel 16 (*Governing Palm Oil and Other Vegetable Oil Crops by the SDGs: From Fragmented to Integrative Governance*) yang diselenggarakan secara virtual oleh Universitas Wageningen (WUR) di Belanda tanggal 23 Juni 2022. Kegiatan-kegiatan seminar internasional dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai hasil kajian terkait kontribusi minyak nabati terhadap pencapaian SDGs dan mengajak para akademisi yang hadir untuk melakukan *joint research* guna lebih memperkaya data-data terkait seluruh minyak nabati.

Kerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri (*joint research*), seperti *joint study* antara IPB dengan Wageningen University (Belanda) yang mulai dilaksanakan di awal tahun 2022. Selain itu juga dilakukan serangkaian *Policy Dialogue and Discussion* dengan negara-negara penghasil komoditas minyak nabati. Kegiatan ini selain untuk berbagi pengetahuan dan *best practices* mengenai penerapan *sustainability* pada komoditas minyak nabati di negara setempat, juga sebagai upaya memperoleh dukungan atas berbagai inisiatif yang diajukan oleh Indonesia di berbagai forum internasional untuk SVO.

Pada tatanan regional, telah dilaksanakan *Joint Working Group Meeting on Palm Oil Between the European Union and Relevant ASEAN Member States* pada tahun 2021 dan 2022 sebagai hasil kesepakatan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-23 ASEAN-UE pada bulan Desember 2020. Pertemuan ini merupakan wadah diskusi dan berbagi pandangan mengenai aspek keberlanjutan minyak nabati. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain: mekanisme berbagi informasi tentang SVO; tantangan produksi SVO; membangun kesamaan pandangan dalam

mengatasi tantangan dengan komprehensif, holistik, transparan, dan non-diskriminatif; membangun persamaan pemahaman mengenai kriteria berkelanjutan dan proses sertifikasi; memajukan kerangka Agenda 2030 sebagai dasar pembahasan; dan membahas peluang kerja sama teknis arah mengenai SVO.

Upaya diplomasi minyak nabati Indonesia telah dilakukan di level multilateral, seperti yang dilakukan di forum *Intergovernmental Group Meeting on Oilseeds, Oils, and Fats* (IGG OOF) yang merupakan forum konsultasi antarpemerintah dan pertukaran tentang tren produksi, konsumsi, perdagangan dan harga komoditas minyak sayur, minyak dan lemak, termasuk penilaian situasi pasar global dan prospeknya. Pada 31st IGG OOF tanggal 4-5 Maret 2021 telah dibahas inisiatif yang disampaikan oleh Indonesia untuk menyusun *Voluntary Guidelines for Sustainable Vegetable Oils in Support of SDGs* (VGSVO). *Voluntary guidelines* ini bertujuan untuk mendorong perlakuan yang adil, holistik, non-diskriminatif terhadap seluruh jenis minyak nabati sesuai dengan 3 (tiga) pilar SDGs. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk petani skala kecil dalam produksi SVO.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah mengembangkan *Vegetable Oils and SDGs Dashboard* pada portal Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id) yang merupakan media visual interaktif bagi untuk mengakses data minyak nabati. *Dashboard* ini merupakan salah satu inovasi Kementerian Luar Negeri untuk mendorong diplomasi ekonomi minyak nabati. Data-data dalam *dashboard* memuat indikator kontribusi 20 (dua puluh) jenis minyak nabati terhadap pencapaian SDGs sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil kajian pada tahun 2021 (Kementerian Luar Negeri, 2021) yang berjudul "*What Numbers Tell: Contribution of Vegetable Oils towards Sustainable Development Goals*". *Dashboard* ini menyajikan 3 (tiga) menu data, yaitu: pertama, *Global Data in Vegetable Oils*, untuk melihat jenis minyak nabati yang diproduksi oleh negara-negara di dunia. Kedua, *SDGs Achievement*, untuk melihat data terkait kontribusi minyak nabati oleh SDGs, dan ketiga *Comparison of Vegetable Oils*, untuk melihat komparasi antara minyak nabati dengan SDGs Goals.

Penggunaan narasi dalam konteks pencapaian tujuan SDGs 2030 di atas dan tekanan yang terjadi terhadap ketersediaan minyak nabati di dunia untuk mendukung keamanan pangan global serta gangguan terhadap rantai pasok global, akan memperkuat upaya diplomasi ekonomi minyak

nabati Indonesia di tingkat global di tengah-tengah tekanan dan upaya diskriminatif yang selama ini terjadi terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia tersebut. Setidaknya konflik Rusia-Ukraina telah menimbulkan tantangan tersendiri terhadap upaya berbagai negara dalam mencapai target SDGs 2030. Upaya dan perlakuan diskriminatif terhadap salah satu produk minyak nabati akan tidak mendukung upaya dunia saat ini dalam mengatasi keamanan pangan.

Penutup

Perkembangan politik internasional akibat konflik Rusia-Ukraina telah menimbulkan dampak tidak hanya instabilitas politik internasional, namun juga tekanan terhadap komoditas produk pertanian maupun sektor energi di dunia. Komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini mendapatkan tekanan yang bersifat diskriminatif dari Uni Eropa juga memiliki implikasi ekonomi akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina. Gangguan terhadap rantai pasok minyak nabati dunia dan sangat diperlukan tersedianya ketahanan pangan serta dampak terhadap pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati selama ini, menjadikan Indonesia berupaya menggunakan narasi yang ada melalui diplomasi ekonomi. Hal ini juga terkait dengan diplomasi minyak nabati Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi berkenaan dengan minyak nabati Indonesia juga merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia.

Secara umum, minyak nabati dapat memainkan peran penting, antara lain dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk domestik bruto (PDB), menyediakan pasokan protein dan lemak tak jenuh ganda yang baik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memasok sumber energi terbarukan (biodiesel). Berbagai bentuk kontribusi dari minyak nabati tersebut perlu didukung oleh peran dari berbagai pihak dalam mengarusutamakan diplomasi minyak nabati di berbagai level, baik bilateral, regional, dan multilateral. Selain itu, penting untuk mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam: mendorong kebijakan tentang keberlanjutan berdasarkan kerangka yang disepakati secara internasional, khususnya *Agenda 2030 for Sustainable Development* dan SDGs-nya; mendorong pendekatan yang seimbang dan keberlanjutan dengan berfokus pada 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup; mempromosikan

nilai inklusivitas dalam mengembangkan kerangka minyak nabati berkelanjutan, termasuk kemitraan antara konsumen dan produsen; memperkuat kemitraan untuk memajukan SVO, termasuk melalui: peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan transfer pengetahuan dalam mengembangkan dan memproduksi SVO beserta seluruh rantai pasok globalnya; meningkatkan kerja sama internasional untuk penelitian dan pengembangan tentang SVO; dan menetapkan standarisasi yang disepakati secara internasional untuk SVO berdasarkan SDGs di tingkat regional dan/atau multilateral.

Dampak yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina terhadap komoditas ekspor Indonesia, khususnya minyak nabati, mendorong Indonesia melakukan pendekatan diplomasi ekonomi minyak nabati dalam konteks pencapaian SDGs 2030 sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.
- Bayne, N. & Woolcock, S. (2007). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. Ashgate.
- Berger, T. (2010). Japan in Asia: A Hard Case for Soft Power, *Orbis*, Fall, pp. 565-582.
- Berridge, G. R. & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. 2nd ed. Palgrave.
- Bull, H. (2002). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. Palgrave.
- Dinnata, H. Z., & Nuraeni, N. (2020). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26067>
- Gilpin, J. M. (2000). *The World Economy in the 21st Century*. Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv36zqhs>
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.
- Griffiths, M. (1999). *Fifty Key Thinkers in International Relations*.
- Hadiwinata, B. S. (Bob S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional:*

arus utama, alternatif, dan reflektifis.

- Hakim, L., Mas'ood, M., & Sugiono, M. (Eds.). (2021). *The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*. Gajah Mada University Press.
- Haryono, E. (2019). Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018: Challenges and Opportunities. *Global Strategis*, 13(2), 49-62.
- Hutabarat, L. (2005). Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional. *Sociae Polites*, 5(22).
- Hutabarat, L. (2018). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Pasar Prospektif Di Kawasan Pacific Alliance: Studi Kasus Meksiko Dan Chile. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.806>
- Kementerian Luar Negeri. (2020). *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Luar Negeri. (2022). What Numbers Tell: Contribution of Vegetable Oils towards Sustainable Development Goals. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1201/halaman_list_lainnya/pusat-strategi-kebijakan-multilateral
- Killian, P. M. E. (2022). ASEAN's External Economic Relations and the Limits of Its Economic Diplomacy. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.4>
- Lee, D., & Hocking, B. (2010). Economic Diplomacy. In R. A. Denemark & R. Marlin-Bennett (Eds.), *The International Studies Encyclopedia* (pp. 1216-1227). Wiley-Blackwell.
- Lee, D., & Hudson, D. (2004). The old and new significance of political economy in diplomacy. *Review of International Studies*, 30(3), 343-360. <https://doi.org/10.1017/S0260210504006102>
- Lestari, D., Wibowo, K., Setiawan, S., & Setyawan, D. (Eds.). (2020). *Dinamika kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral dalam upaya mewujudkan Indonesia maju 2045*. Gramedia Pustaka Utama.
- Masoed, M. (1994). *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES.
- Moons, S. J. V., & van Bergeijk, P. A. G. (2017). Does Economic Diplomacy Work? A Meta-analysis of Its Impact on Trade and Investment. *The World Economy*, 40(2), 336-368. <https://doi.org/10.1111/twec.12392>

- Nugroho, R. (2021). *Foreign Policy: Menuju Kebijakan Luar Negeri Level 4*. PT. Elex Media Komputindo.
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1-2), 7-36. <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>
- Okano-Heijmans, M. (2012). Japan's New Economic Diplomacy: Changing Tactics or Strategy? *Asia-Pacific Review*, 19(1), 62-87. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628>
- Okano-Heijmans, M. (2013). *Economic Diplomacy: Japan and the Balance of National Interests*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Rana, K. S. (2012). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries. In K. S. Rana (Ed.), *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiations in International Relations* (pp. 201-220).
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Macmillan Publishing Company.
- Wæver, O., & Newmann, I. B. (1997). *The Future of International Relations: Masters in the Making*. Routledge.
- Woolcock, S. (2012a). *European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations*. Ashgate Publishing Company.
- Woolcock, S. (2012b). Multilevel Economic Diplomacy: The Case of Investment. In N. Bayne & S. Woolcock (Eds.), *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations* (2nd ed.). Ashgate.

Biodata Penulis

Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A. lahir di Samarinda, 27 Februari 1992. Sejak tahun 2017 hingga saat ini bergabung menjadi dosen tetap di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Lulus Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan mendapatkan gelar Master of Arts (M.A.) pada S2 Ilmu Hubungan Internasional Gadjah Mada tahun 2017. Mengajar dan memiliki kajian dengan fokus konsentrasi berbagai topik, diantaranya: Pancasila, Kewarganegaraan, Politik Luar Negeri Indonesia, Geopolitik Geoekonomi dan Geokultur, Ekonomi Internasional, Sistem Ekonomi Indonesia, Hukum Internasional, Pariwisata Internasional, dan Politik Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ia aktif menulis di sejumlah jurnal dan prosiding akademis nasional maupun internasional. Penulis merupakan anggota Emerging Indonesia Project (EIP) serta Alumni INDEF School of Political Economy (ISPE) XXI.

Khairil Ramadhani S. Hum, M.A. menamatkan pendidikan tinggi di Program S1 Ilmu Sejarah Universitas Airlangga Surabaya (2015), dan Program S2 Kajian Asia Tenggara di Chulalongkorn University, Bangkok (2018). Kini, Khairil Ramadhani merupakan dosen S1 Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Timur.

Sindy Yulia Putri, S.Pd., M.Si. adalah Dosen PNS di Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Ia memiliki kepakaran ilmu di ranah hubungan internasional seputar isu-isu bantuan luar negeri, pembangunan global, ASEAN, kerjasama ekonomi-politik antara negara-negara di kawasan Asia Timur dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hingga tahun 2022 ini, ia sudah memiliki dua buku referensi yang ditulis sendiri dan dua buku referensi sebagai hasil kolaborasi riset dengan Universitas Indonesia.

Prof. Dr. Sukawarsini Djelantik adalah Guru besar Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, Indonesia. Lulus Ph.D. untuk bidang Hubungan Internasional

dan Diplomasi dari Flinders University, Australia. Lulus program Master of International Studies (MIntS) dari The University of Sydney, Australia, dan Doktoranda (Dra) dari Universitas Padjadjaran. Topik-topik kajian termasuk komunikasi internasional, isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional (terorisme, migrasi, gender). Buku yang telah diterbitkan antara lain: "Diplomasi Pada Era Informasi" (2022), Perang Global Melawan Covid-19 (2021), Diplomasi dalam Politik Global (2016), Asia-Pasifik; Konflik, Kerjasama dan Relasi Antar Kawasan (Yayasan Obor, 2015). Mendapatkan fellowship dari the Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian University, Australia tahun 1999, Fulbright Junior Research Fellowship di Georgetown University, Washington D.C, USA (2002), dan East-West Centre Research Fellowship di Washington D.C, AS (2023). Menjadi Kepala Pusat Kajian Parahyangan Centre for European studies (2022-sekarang). Mata kuliah yang diampu adalah Komunikasi Internasional, Diplomasi, Hubungan Internasional di Asia-Timur.

Prof. Dr. Andrik Purwasito DEA, adalah Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang lahir di Trenggalek, 13 Agustus 1957. Selesai kuliah pada Jurusan HI, Fisipol UGM (1981), selesai studi Master dan Doktor 1992 di EHESS, Paris Prancis. Ia memfokuskan studi HI pada bidang Diplomasi dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Kebudayaan. Ia menjadi dosen tamu, di INALCO, Paris (1990), di Sofia University, NBU, NATFIZ, Belgia (2015), di Sekolah Indonesia-Moscow, Rusia (2016), di Universitas Kurume, Jepang (2016-2017), dll. Ia juga menerima penghargaan di bidang akademik dan seni sastra serta drama tingkat nasional. Karya yang ia miliki antara lain Kisah Anak Pesisir Perigi (Novel anak2, Depdikbud, 1983), Seninjong (Puisi, 1987), Tentang Buah Apel (puisi, 1989), Cintaku Menyebrang Laut (puisi, 1997), Lentik-lentik Bulu Mata Patah (Novel, Solo Pos, 1987) dan buku ilmiah populer, seperti Global AS-US dalam Percaturan Politik Internasional (UNS Press, 1995), Pengantar Studi Politik (UNS Press, 2011), Imajeri India (Pustaka Cakra, 2001), Komunikasi Multikultural (UMS Press, 2003), L'Ars Factum, Metodologi Penciptaan Seni (UNS Press, 2017), Nano Power Diplomacy: Study about Nonstate Actors (Ebook, 2021), dan Nano Power Diplomacy: Migrasi diplomasi platform Offline to

Diplomasi platform Online (UNS Press, 2023). Erwin Kartinawati adalah doktor dan peneliti pada prodi Ilmu Komunikasi di USAHID, Surakarta.

Leonard Felix Hutabarat, S.I.P., M.Si., Ph.D, adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada (2018-2021) dan mantan United Nations Peacekeeper (Blue Helmet) pada United Nations Interim Force in Lebanon / UNIFIL (2006-2007). Ia dianugerahi Medali Veteran Republik Indonesia untuk Perdamaian pada tahun 2015. Beberapa penghargaan dan satyalancana yang diperoleh adalah United Nations Peacekeeping Forces Military Medal (2006 and 2007), Satyalancana Santi Dharma (2007), dan Satyalancana Karya Satya Republik Indonesia untuk 10 dan 20 Tahun (2008 dan 2018). Ia juga pernah menjadi Liaison Officer di Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di New Delhi, India (2008-2012). Pendidikan dan pelatihan khusus yang diikuti antara lain United Nations Peacekeeping Courses, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)-UN Department of Peacekeeping Operations Integrated Training Service (DPKO ITS), Lebanon, (2006-2007), United Nations Civil-Military Liaison Officers Course, UN Peace Support Operations-United States Pacific Command/USPACOM, Jakarta (2008), dan Senior Diplomatic Course, The Netherlands Institute of International Relations (NIIR), Clingendael, Den Haag (2013). Sebagai praktisi juga memiliki pengalaman mengajar antara lain di Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Pertahanan, serta merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Triesanto Romulo Simanjuntak, S.I.P., M.A. adalah dosen Hubungan Internasional di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah. Sebagai seorang pengajar dan akademisi, ia memiliki spesialisasi dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri.

Dr. Nur Rachmat Yuliantoro adalah staf pengajar (Lektor Kepala) Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Bidang-bidang kajian yang menjadi fokus utamanya adalah hubungan internasional Cina, politik luar negeri Amerika Serikat, dan korupsi politik. Ia bisa dihubungi di nur.rachmat@ugm.ac.id

Seri buku AIHII edisi pertama ini membahas isu-isu kontemporer internasional. Dalam hal ini, isu yang dibahas adalah konflik Rusia - Ukraina yang juga menjadi salah satu peristiwa internasional di tahun 2022.

Buku ini menyajikan beberapa tulisan terkait Rusia - Ukraina dalam berbagai perspektif yang dapat menambah khasanah ilmu akademisi Hubungan Internasional di Indonesia.



Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

ISBN 978-623-09-1143-9

